



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA INSPEKTORAT

Jalan K.H. Wahid Hasyim Nomor 8 Telp. 061-41450461-4524309 Fax. 061-150194

M E D A N - 20154

KEPUTUSAN INSPEKTUR PROVINSI SUMATERA UTARA

NOMOR : 000/1378/INS/1/11/2023

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA KEGIATAN (PPTK) PADA INSPEKTORAT PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2023

INSPEKTORAT PROVINSI SUMATERA UTARA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pengguna Anggaran menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Inspektur Provinsi Sumatera Utara tentang penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Inspektorat Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara, jo Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Provinsi;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara;

10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023;
11. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 27 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Sumatera Utara;
12. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 40 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN INSPEKTUR PROVINSI SUMATERA UTARA TENTANG PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) PADA INSPEKTORAT PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2023**

KESATU : Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Inspektorat Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023;

KEDUA : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas ;

1. Mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis kegiatan/sub kegiatan Inspektorat, meliputi :
 - a. Menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan;
 - b. Memonitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan;
 - c. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan kepada PA/KPA.
2. Menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan, meliputi :
 - a. Menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan;
 - b. Menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan;
 - c. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan.
3. Menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada kegiatan/sub kegiatan Inspektorat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa.

KETIGA : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Inspektorat Provinsi Sumatera Utara;

KEEMPAT : Susunan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan beserta uraian kegiatan yang dikelolanya tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam keputusan ini;

KELIMA : Dengan ditetapkannya keputusan ini maka Keputusan Inspektur Provinsi Sumatera Utara dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi;

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku untuk Tahun Anggaran 2023 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Medan

Pada Tanggal : 01 Maret 2023



Tembusan:

1. Badan Keuangan dan Aset Daerah Provsu selaku PPKD
2. Kuasa Pengguna Anggaran
3. Para PPTK
4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab

Lampiran

Surat Keputusan Inspektur
 Nomor : SKD/SIB/148/III/2023
 Tanggal : 01 Maret 2023

Daftar Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Inspektorat Provinsi
 Tahun Anggaran 2023

No. PPTK	PROGRAM/ KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN	
1	Dewi Supriaty Lubis, SH NIP. 19730202 201001 2 001 Kepala Subbagian Umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	39,985,338,163	LASRO MARBUN NIP. 196412011987011002 Pengguna Anggaran
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3,472,853,320	
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	638,880,000	A. YAZID MATONDANG NIP. 19690528 199803 1 003 Kuasa Pengguna Anggaran
		Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	40,040,000	
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	45,000,000	
			Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawalan	9,000,000	
			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	169,200,000	
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	799,144,000	
			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	112,743,576	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10,807,500	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	363,933,546	
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	72,578,608	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	629,575,933	
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	225,105,030	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	11,750,000			
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	430,084,000			
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	10,000,000			
	Pengadaan Mebel	179,701,105			
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22,397,710			

2	Ramadhanl Muharni, SE NIP. 19800807 200502 2 004 Kasubbag PEP	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60,000,000	A. YAZID MATONDANG NIP. 19690528 199803 1 003 Kuasa Pengguna Anggaran		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1,050,000,000			
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Melebihi Pagu Validasi	239,064,900			
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	99,840,000			
			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	50,000,000			
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1,110,680,000			
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	178,330,000			
			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI				
			Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	60,000,000		A. YAZID MATONDANG NIP. 19690528 199803 1 003 Kuasa Pengguna Anggaran	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	183,430,000		A. YAZID MATONDANG NIP. 19690528 199803 1 003 Kuasa Pengguna Anggaran			
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	25,000,000					
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	20,000,000					
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	30,000,000					
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	98,904,000					
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI							
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	905,295,500		A. YAZID MATONDANG NIP. 19690528 199803 1 003 Kuasa Pengguna Anggaran			
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN						
Pendamangan dan Asistensi	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Melebihi Pagu Validasi	3,168,050,379		A. YAZID MATONDANG NIP. 19690528 199803 1 003 Kuasa Pengguna Anggaran			
	Pendamangan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	278,220,000					

3	Bayu Andrew NIP. 19790214 199711 1 001 Inspektur Pembantu I	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN			A. YAZID MATONDANG NIP. 19690528 199803 1 003 Kuasa Pengguna Anggaran	
		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	5,226,776,000		
			Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	1,936,971,000		
			Revisi Laporan Kinerja	702,250,000		
4	Ridwan NIP. 19700704 199103 1 008 Inspektur Pembantu III	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI			A. YAZID MATONDANG NIP. 19690528 199803 1 003 Kuasa Pengguna Anggaran	
		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	171,960,000		
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN				
			Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	3,982,615,000		
5	Hafidz Tigor Barita NIP. 19850117 201001 1 011 Inspektur Pembantu Khusus	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI			A. YAZID MATONDANG NIP. 19690528 199803 1 003 Kuasa Pengguna Anggaran	
		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	646,025,000		
		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI				
			Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	4,159,072,000		
		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI			A. YAZID MATONDANG NIP. 19690528 199803 1 003 Kuasa Pengguna Anggaran	
		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	1,761,660,600		
			Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	85,070,000		

